

SUMBER : *Kompas*

HARI/TGL. : *Sabtu 4-6-1988* HAL./KOL. : *IX/-4*

KODE : *6*

Kecurangan Proses Pemilihan Kepala Desa Ditangani LBH

Yogyakarta, Kompas

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta saat ini tengah menangani laporan penduduk menyangkut pemilihan kepala desa dari enam kelurahan di tiga propinsi. Laporan yang masuk sebulan terakhir itu hampir senada, yakni dijumpainya berbagai bentuk kecurangan dalam pesta demokrasi tingkat desa. Keenam laporan, dua dari Daerah Istimewa Yogyakarta, satu dari Jawa Tengah dan tiga dari Jawa Timur.

Kepada Kompas Kamis lalu, Direktur LBH Yogyakarta Artijo Alkostar SH mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap tiga laporan dari Jawa Timur dan Kabupaten Sleman (DIY). Hasilnya, tambah Artijo, memang ada kecurangan dalam

proses pemilihan kepala desa setempat yang merugikan penduduk sebagai pemilih. "Laporan dan bukti-bukti mengenai berbagai bentuk kecurangan itu, sudah kami laporkan ke masing-masing bupati. Meski demikian, belum ada tindak lanjutnya," ujar Artijo di kantornya.

Pihaknya akan menunggu lagi reaksi dari tiap-tiap bupati yang diberi laporan. Namun jika sampai saatnya belum ada tindak lanjutnya akan dilaporkan ke instansi yang lebih atas. "Syukur bisa diselesaikan sebelum mereka dilantik," katanya tegas.

Pelantikan kepala desa biasanya menunggu kalau situasinya sudah memungkinkan. Pelantikan ini dilakukan bupati mewakili gubernur.

Berbagai kecurangan

Dari berbagai laporan ke pihaknya Artijo menyimpulkan, di beberapa daerah timbul kesan pemilihan kepala desa telah dipolitisasikan. Calon dari golongan tertentu meski tak mendapat dukungan rakyatnya, ia harus digolkan lewat berbagai cara. Antara lain, intimidasi terhadap para calon pemilih agar memberi suara kepada calon kepala desa bersangkutan. "Ini tak sehat," cetus Artijo.

Kasus lainnya adalah memanggil calon pemilih dari luar daerah. Meskipun calon pemilih itu tak ber-KTP (kartu tanda penduduk) setempat, mereka bisa memberi suara. Kasus demikian, menurut Artijo, diterimanya dari Karangmojo (Gunungkidul, DIY) dan Rejowinangun (Purworejo, Jawa Tengah).

Kepada LBH Yogyakarta, penduduk dari Karangmojo dan Rejowinangun tersebut melaporkan bahwa jumlah penduduk setempat yang berhak memberi suara tiba-tiba membengkak. Dari penelusuran kemudian terbukti, salah satu calon kepala desa telah mengundang pulang sanak familinya yang tinggal di rantau. Walau mereka itu adalah penduduk setempat, namun sebetulnya tak punya hak pilih, karena tak lagi memegang KTP di sana. Calon kepala desa ini dalam perhitungan suara menempati urutan teratas, tetapi kemudian diprotes pendu-

duk yang mengetahui ada kecurangan.

Laporan diabaikan

Berbagai bentuk kecurangan tadi langsung dilaporkan ke camat. Namun camat sebagai pemimpin di daerah menanggapi laporan yang disertai data itu secara dingin. Karenanya penduduk yang merasa dirugikan membawa persoalan ke LBH agar ditangani lebih lanjut. Demikian Artijo.

Ia mengungkapkan, bentuk kecurangan lainnya adalah pemalsuan ijazah. Penduduk melaporkan, kepala desa terpilih sebetulnya tak berijazah. Tetapi mengapa kemudian yang bersangkutan tiba-tiba bisa mengajukan ijazah SMP untuk persyaratan kepala desa. Kasus ini terjadi di Situbondo dan Sampang. "Kami telah menelusuri calon terpilih memang hanya sampai kelas II Sekolah Dasar. Setelah dicek di kabupaten ia memiliki ijazah SMP," tegas Artijo.

LBH Yogyakarta melacak juga ke sekolah yang mengeluarkan ijazah. Menurut Artijo, uang juga berperan dalam proses pemilihan kepala desa walau merupakan suatu larangan. Beberapa saat sebelum pemilihan berlangsung, seorang calon mendatangi para pemilih sambil membagikan uang. Di Yogyakarta, pasaran yang diberikan ke calon pemilih sebesar Rp 10.000. (pom)